

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN *UNITED NATIONS FOR WOMEN* (UN WOMEN) DALAM UPAYA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI LEBANON PADA TAHUN (2018-  
2020)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program  
Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram**

**MILA FATMI INSANI**

**L1A016058**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN PUBLIKASI

Dengan ini kami menyatakan bahwa artikel yang berjudul “Peran United Nations for Women (UN Women) dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Lebanon Pada Tahun (2018-2020)”, telah disetujui untuk dipublikasikan.

Nama Mahasiswa : Mila Fatmi Insani  
Nomor Mahasiswa : L1A016058  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Minat Jurusan : Keamanan Internasional

Mataram, 01 Maret 2023

Mengesahkan dan Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Lalu Putrawandi Karjaya, S.IP., MA  
NIDN: 0026078104

Dosen Pembimbing II



Y. A Wahyudin, S.IP., MA.  
NIDN: 0027128205

# PERAN *UNITED NATIONS FOR WOMEN* (UN WOMEN) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI LEBANON PADA TAHUN (2018-2020)

Mila Fatmi Insani

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: [fatmiinsani14@gmail.com](mailto:fatmiinsani14@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to provide an overview of the role of UN Women in efforts to empower women in Lebanon during times of crisis (2018-2020). This effort was made, considering that UN Women is a UN entity engaged in the field of women, especially related to discrimination against women with the principle of gender inequality. Lebanon is one of the countries in the Middle East that still experiences high levels of discrimination against women due to its sectarian political system, which is called "confessionalism". This research is descriptive qualitative in nature to analyze the various phenomena or problems studied. The author also collects secondary data from various books, journals, documents, articles in various media, such as the internet. The results of the research show that the role and collaborative efforts with the government and other NGOs have had quite a good impact on the lives of women in Lebanon in efforts to reduce discrimination through empowering women.*

**Keywords:** *UN Women, discrimination, empowerment, confessionalism, Lebanon.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan di Lebanon dalam masa-masa krisis tahun (2018-2020). Upaya tersebut dilakukan, mengingat UN Women merupakan entitas PBB yang bergerak dalam bidang perempuan khususnya terkait diskriminasi perempuan dengan prinsip ketidaksetaraan gender. Lebanon merupakan salah satu negara di Timur tengah yang masih mengalami diskriminasi perempuan cukup tinggi yang disebabkan oleh sistem politik sektariannya yang disebut "confessionalism". Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk menganalisis berbagai fenomena atau masalah yang diteliti. Penulis juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, seperti internet. Hasil penelitian menunjukkan peran serta upaya kerjasama dengan pemerintah serta NGO lainnya membawa dampak yang cukup baik bagi kehidupan perempuan di Lebanon dalam upaya mengurangi diskriminasi melalui pemberdayaan perempuan.

**Kata Kunci:** UN Women, diskriminasi, pemberdayaan, konfessionalisme, Lebanon.

## PENDAHULUAN

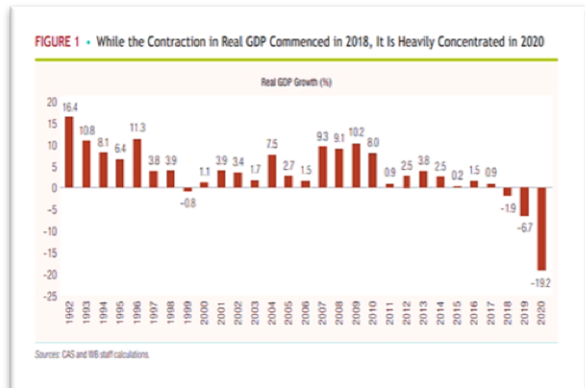
Situasi politik, ekonomi dan sosial-budaya di Lebanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional di Timur Tengah hal ini dipengaruhi oleh sistem politik yang berkembang dalam negara tersebut yaitu; sistem politik “*confessionalism*” yang membagi kekuatan politik berdasarkan pada kelompok agama dan sekte tertentu hingga sangat rentan menimbulkan perpecahan sosial-politik, mengingat setiap kelompok politik berafiliasi pada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi situasi regional, seperti kelompok pro-Suriah, pro-Iran, maupun pro-Barat (AS dan Uni Eropa).<sup>1</sup>

Sistem politik sektarian berkembang sangat pesat hingga mampu melahirkan kelompok-kelompok agama tertentu seperti faksi-faksi Palestine Liberation Organization (PLO), Lebanese National Movement (LNM), dan Lebanese Front (LF). Selain itu Lebanon juga menjadi salah satu tempat penampungan ribuan pengungsi Palestina yang tinggal di kamp-kamp darurat akibat dari serangan Israel. Sejak saat itu Lebanon menjadi sasaran serangan Israel sekaligus mereka ingin mengontrol upaya perlawanan kelompok gerilyawan garis keras dengan menginvasi Lebanon.<sup>2</sup>

Sejarah konflik yang terjadi di Lebanon dengan keterlibatan berbagai kelompok bahkan negara lain telah mengubah Lebanon menjadi negara yang semakin mengkhawatirkan hingga mengalami banyak krisis. Salah satu data dari Bank Dunia menunjukkan kontraksi ekonomi yang begitu dalam pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Riil yang dimulai pada tahun 2018, dikarenakan hampir seluruh negara melakukan

pembatasan mobilitas secara ketat, dan terus berkontraksi hingga pada tahun 2020.<sup>3</sup>

Gambar 1. Produk Domestik Bruto Riil tahun 2018-2020



Sumber: World Bank

Berdasarkan data tersebut sedikit menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian di Lebanon selama 2 tahun terakhir. Kita bisa melihat dari tahun 1999 yaitu; pertumbuhan riil PDB mencapai angka minus hingga (-0,8%) sebagai dampak dari krisis moneter tahun 1998. Selanjutnya pada tahun 2006 ketika terjadi perang 34 hari bersama Israel, PDB mulai mengalami penurunan kembali menjadi (1,5%) meski tidak mencapai angka minus. Konflik tersebut melahirkan resolusi DK-PBB yang memunculkan gencatan senjata di antara kedua belah pihak untuk sepakat mengakhiri perang. Pemulihan ekonomi mulai berjalan kembali hingga berdampak cukup baik pada pertumbuhan PDB hingga mencapai angka (10,2%) tahun 2009. Pada 2011 rentang waktu satu tahun, mengalami penurunan cukup banyak melebihi tahun 2006 yaitu berada pada angka (0,9%). Hingga pada tahun 2018-2020, menjadi puncak penurunan yang cukup signifikan bahkan mencapai angka minus (-1,9%) terus meningkat menjadi (-19,2%) yang semakin diperburuk dengan adanya pandemi tahun 2019. Selanjutnya disusul dengan ledakan yang terjadi tahun 2020 di

<sup>1</sup>KBRI, 'Tentang Lebanon', <<https://kemlu.go.id/beirut/id/read/tentang-lebanon/219/information-sheet>>, diakses pada 07 Januari 2023.

<sup>2</sup>M. Ari Yulianto, 'Lebanon: Pra dan Pasca Perang 34 Hari Israel vs Hizbullah,' Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat, 2013, p. 60.

<sup>3</sup>World Bank, 'Lebanon Economic Monitor: The Deliberate Depression', World Bank Group, Washington DC, 2020, p. 20.

Pelabuhan kota Beirut. Sehingga berdasarkan data Bank Dunia yang menunjukkan perkembangan PDB riil setiap tahunnya, maka artinya kontraksi tersebut semakin menemui titik klimaks di tahun 2020 dan terus dilakukan pemulihan hingga saat ini. Sehingga kondisi ekonomi yang semakin memburuk hingga menyebabkan Lebanon menyatakan gagal untuk membayar utang luar negerinya pada Maret 2020 berdasarkan data *Standard and Poor's*.<sup>4</sup>

Dampak fisik dari konflik bersenjata adalah berupa kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang diperburuk dengan adanya korban jiwa, dan disertai dengan berbagai bentuk diskriminasi yang terus terjadi secara struktural akibat perkembangan sistem politik sektarian. Sehingga, dalam tulisan ini penulis ingin menganalisis bagaimana bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Lebanon yang diperburuk dengan kondisi negara dalam masa-masa krisis serta kaitannya dengan masuk dan berkembangnya UN Women dalam negara tersebut.

Semua dampak konflik yang telah dijelaskan sebelumnya serta penandatanganan salah satu Konvensi tentang perempuan oleh Lebanon yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW) merupakan contoh dari penetapan standar atau norma serta deklarasi internasional yang berupaya untuk mengurangi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan yang terdiri dari 30 Pasal dan mulai berlaku pada 3 Desember 1981. Hingga pada tanggal 18 Maret 2005, lebih dari 90% negara-negara anggota PBB (180 negara) merupakan negara peserta Konvensi. Seluruh negara di dunia tentu telah meratifikasi berbagai bentuk hukum yang berlaku dalam dunia internasional sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Hak perempuan Lebanon untuk memilih diakui pada tahun 1952, dan sejak saat itu perempuan Lebanon telah

membuat langkah besar dalam memajukan agenda pemberdayaan perempuan.<sup>5</sup>

Badan yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang telah diciptakan PBB adalah United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women). Keterlibatan dari salah satu organisasi internasional yaitu UN Women yang dibentuk pada tanggal 2 Juli 2010 oleh Majelis umum PBB yang mulai beroperasi sejak Januari 2011.<sup>6</sup> Dalam mencapai tujuannya, sebagai satu-satunya entitas PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender, mereka mengumpulkan keahlian gender terbaik dunia dan sumber daya yang cukup besar dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Mereka menghubungkan orang-orang di banyak bidang, nasional dan internasional, publik dan swasta, aktivis dan pejabat.<sup>7</sup>

Keseriusan PBB dalam menyelesaikan dan mengurangi permasalahan diskriminasi terhadap kaum perempuan di dunia telah ditunjukkan secara nyata dalam beberapa deklarasi, perjanjian, norma dan standar internasional yang telah diciptakan untuk dapat diterapkan, diterima dan dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Sehingga CEDAW dan UN Women dapat kita katakan berjalan bersama dalam menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga masuknya UN Women di Lebanon menjadi salah satu momentum bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk berusaha

---

<sup>5</sup>UN Women, 'Arab States' <<https://arabstates.unwomen.org/en/countries/ebanon>> diakses pada 27 Juli 2021.

<sup>6</sup>S. Ayuningtyas, 'Peran UN Women dalam Melindungi Hak-hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya terhadap Kesetaraan Gender,' Universitas Pasundan, 2016, p. 44.

<sup>7</sup>'UN Women impact stories: Women, peace, and security,' UN Women, 2021, <<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/brief-un-women-impact-stories-women-peace-and-security>>, diakses pada 26 Oktober 2021.

bekerjasama memperbaiki sekaligus membangun Lebanon kembali ditengah kekacauan yang telah terjadi sebelumnya akibat konflik.

Sekaligus bekerja secara global untuk mewujudkan visi dari SDG's sebagai sebuah kenyataan bagi perempuan dan anak perempuan dan berdiri dibelakang kesetaraan dan partisipasi untuk perempuan dalam segala aspek kehidupan. Khususnya yang berfokus pada empat prioritas strategi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Memimpin partisipasi perempuan dalam mendapatkan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan
2. Perempuan memiliki jaminan pendapatan, pekerjaan yang layak dan otonomi ekonomi
3. Semua perempuan dan anak perempuan menjalani kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan
4. Perempuan dan anak perempuan berkontribusi dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membangun perdamaian dan ketahanan yang berkelanjutan, dan mendapat manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik serta aksi kemanusiaan.

Konsep yang penulis gunakan untuk membantu menganalisis tulisan ini yaitu teori dan konsep Organisasi Internasional dalam perannya sebagai suatu entitas dibawah naungan PBB serta menjadi salah satu International Governmental Organizations (IGO). Dengan berbagai program yang telah dibentuk oleh UN Women, hingga memfasilitasi program tersebut untuk memaksimalkan peran dan potensi serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah. Hal tersebut melibatkan kehidupan seluruh masyarakat Lebanon untuk mendorong mereka bergerak maju dimasa-masa sulit, ditengah

krisis yang terus berkembang di Negara tersebut sejak akhir tahun 2018 lalu. Sehingga rentang waktu permasalahan dalam tulisan ini berdasarkan pada tahun 2018-2020 ketika Lebanon benar-benar menyatakan tidak mampu lagi untuk membayar utang luar negerinya.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan suatu landasan berpikir untuk bisa memecahkan permasalahan dari berbagai macam fenomena yang telah terjadi. Sehingga dibutuhkan penyusunan sebuah kerangka teori yang memuat gagasan atau ide untuk dijadikan gambaran serta kerangka berpikir penelitian atas permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti. Penggunaan teori dan konsep yang tepat akan sangat membantu menganalisis lebih dalam terkait dengan perkembangan fenomena yang menjadi fokus penelitian.

### Teori Organisasi Internasional

Peran Organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui keberhasilannya dalam memecahkan permasalahan dalam suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi perilaku suatu negara secara tidak langsung, sekaligus kehadiran setiap organisasi internasional mencerminkan adanya kebutuhan manusia untuk terus bekerjasama dalam menangani segala bentuk tantangan dan hambatan dalam kehidupan bernegara. Menurut *Clive Archer* (1983) dalam bukunya *International Organizations*, peran organisasi internasional dibagi dalam tiga kategori yaitu;<sup>9</sup> *pertama*, sebagai wadah yang merupakan tempat untuk mempertemukan negara-negara anggota membicarakan dan membahas masalah dalam negeri diluar batas negara yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian internasional termasuk membangun *image* negara sendiri (citra). *Kedua*, sebagai instrumen yang berarti organisasi internasional digunakan

---

<sup>8</sup>N. Maya Mahardika, 'Peran dan Fungsi UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda' (2014 -2021), 2021. p.4.

---

<sup>9</sup>C. Archer, 'International Organizations: Third Edition,' New York: Routledge, 2001, p. 7.

oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan pada tujuan politik luar negerinya (alat negara). *Ketiga*, sebagai aktor independen berarti suatu organisasi internasional dapat membuat sebuah keputusan-keputusan secara sendiri tanpa terpengaruh oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Meski tidak ada satupun yang lebih tinggi dari otoritas negara. Bahkan menurut *Barnett* dan *Finnemore* yang beragumen bahwa OI jauh lebih penting dan tidak boleh direduksi menjadi hamba negara.<sup>10</sup>

Adapun dalam menjalankan perannya suatu Organisasi internasional dalam buku yang berjudul "Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional" menyebutkan hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Inisiator: sebagai inisiator, organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai kerja serta mengajukan suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. Bentuk kerja sama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat atau komunitas hingga individu. Sebagai contoh: UN Women memimpin Kelompok Tema Gender PBB, mengumpulkan keahlian gender di negara tersebut untuk mendukung aksi kolektif dalam isu-isu tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. UN Women juga mengirimkan personel ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), untuk mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan di seluruh pekerjaan

---

<sup>10</sup>M. Barnett & M. Finnemore, 'Rules for the World: International Organizations in Global Politics,' Cornell University Press, United States of America, 2004, pp. 5-6.

<sup>11</sup>A. Pareira, 'Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional', Bandung Citra Aditya Bakti; 1999, p. 135.

respons krisis Lebanon.<sup>12</sup> UN Women tidak hanya menginisiasi ide juga meneruskan usulan tersebut kepada mitra lainnya, baik itu pemerintah ataupun organisasi yang turut mendukung kesetaraan gender pada umumnya.

- b. Fasilitator: sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya untuk menyediakan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh: daftar periksa untuk tindakan segera dan jangka panjang diusulkan hingga disediakan untuk pemangku kepentingan COVID-19 di Lebanon, demi menguraikan isu-isu gender terkait dengan wabah dan respon COVID-19. Berdasarkan pelajaran dari epidemi lain yang pernah ada, seperti virus Ebola dan Zika.<sup>13</sup> UN Women juga tidak hanya memfasilitasi ide tersebut, akan tetapi memberikan apa yang memang dibutuhkan berdasarkan sesuatu yang pernah terjadi juga di masa lalu terhadap negara lain terkait dengan penanganan epidemi lainnya.
- c. Determinator: peranan organisasi internasional sebagai determinator adalah upaya dari organisasi internasional dalam memberi dan mengambil keputusan pada suatu masalah. Sebagai contoh: memberikan

---

<sup>12</sup>UN Women, 'Areas of work and programmes-Lebanon', <<https://arabstates.unwomen.org/en/countries/lebanon/areas-of-work-and-programmes>>, diakses pada 02 Februari 2022.

<sup>13</sup>UN Women, 'Women's Needs and Gender Equality in Lebanon's COVID-19 Response', <<https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/gender-equality-in-lebanon-covid-19-response>>, diakses pada 02 Februari 2022.

serangkaian rekomendasi untuk mencapai pemulihan ekonomi yang responsif gender di Lebanon, yang berfokus pada kebijakan fiskal, sosial, tenaga kerja, dan moneter. Hal tersebut ditujukan untuk pembuat kebijakan yang membentuk kerangka pemulihan Lebanon. Dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang dibangun di atas kesetaraan dan memanfaatkan potensi ekonomi semua orang Lebanon.<sup>14</sup> UN Women selain sebagai pihak yang juga merekomendasikan dan mengambil kebijakan terhadap suatu masalah terkait dengan ketidaksetaraan gender. UN Women juga terus memantau hingga pada pembuatan kerangka dari kebijakan pemulihan tersebut.

- d. Mediator atau rekonsiliator: sebagai mediator/rekonsiliator, organisasi internasional akan melakukan peranan sebagai penengah guna menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi diantara anggotanya. Sebagai contoh: UN Women memimpin upaya PBB di Lebanon untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam musyawarah perdamaian dan keamanan nasional, dalam kemitraan dengan berbagai entitas PBB, pemerintah dan sipil sebagai mitra dari masyarakat.<sup>15</sup> Fungsi dari

---

<sup>14</sup>UN Women, 'Gender-Responsive Recovery in Lebanon: Recommendations for Fiscal, Social and Labour Policy Reform', <<https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/gender-responsive-recovery-in-lebanon>>, diakses pada 02 Februari 2022.

<sup>15</sup>UN Women, 'In Brief: Women, Peace, and Security', <<https://arabstates.unwomen.org/en/countries/lebanon/areas-of-work-and-programmes>>, diakses pada 02 Februari 2022.

Organisasi internasional ini selain memediasi dan ikut serta dalam proses rekonsiliasi konflik juga menjamin proses perdamaian itu terus dijaga bersama-sama, diperkuat dengan keterlibatan perempuan dalam setiap musyawarah perdamaian yang dilakukan bersama dengan mitra-mitra lainnya termasuk pemerintah.

Organisasi internasional pada awalnya hanya beranggotakan negara-negara dengan pemerintahan yang berdaulat dan disebut International Governmental Organizations (IGO), seiring dengan perkembangannya juga melibatkan aktor-aktor non-negara yang kemudian disebut International Non-Governmental Organizations (INGO). Tujuan pembentukan organisasi internasional pada umumnya adalah untuk mempromosikan kepentingan dan melindungi negara-negara anggota, menyelesaikan permasalahan tertentu yang menjadi bidang kerjasama, mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individual oleh negara-negara di dunia, serta membantu negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu-isu internasional secara lebih efisien. Termasuk yang terjadi di Lebanon ketika negara sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri, maka tanggung jawab nasional berubah menjadi tanggung jawab internasional, dimana masyarakat internasional berhak untuk melakukan intervensi kemanusiaan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>M. Purwanti, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 'Kewajiban dan Tanggung jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia,' Legal Smart Channel, <<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>> diakses pada 25 November 2021



## Konsep CEDAW

UN Women sebagai salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang perempuan telah menyusun dan menyiapkan berbagai contoh kebijakan strategis agar dapat meningkatkan pembangunan melalui pemaksimalan peran perempuan, memperkuat kemitraan strategis dan memobilisasi sumber daya serta potensi yang ada. UN Women berkerjasama dengan negara anggota PBB dan NGO lain untuk turut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta perjanjian internasional lainnya. Strategi tersebut mencakup beberapa dokumen kunci yang mengarahkan pada strategi baru UN Women, yaitu Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW), kemudian Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration of Platform for Action/PFA*), serta Resolusi Dewan Keamanan dan Pembangunan Milenium (*Millenium Declaration and Millenium Development Goals*).<sup>17</sup> CEDAW adalah konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diratifikasi setidaknya 189 negara, termasuk Arab Saudi, Afghanistan, dan Mesir. Ratifikasi Lebanon atas Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yaitu pada tahun 1996 yang mempercepat terjadinya perubahan kesadaran yang lebih besar akan hak-hak perempuan di Lebanon.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>M. Dymas Oryza, 'Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan,' *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, (2016).

<sup>18</sup>L. C. Siswanto, and A. A. Basith Dir, 'Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death,' *Journal of International Relations*, vol. 6, no. 4, 2020, pp. 517-524.

## METODE PENELITIAN

Dalam Filsafat ilmu pengetahuan kita mengenal tidak hanya sebatas membahas terkait dengan ilmu pengetahuan atas dasar perkiraan-perkiraan yang ada pada subyek, melainkan langsung mengarah pada ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai obyeknya.<sup>19</sup> Pendekatan penelitian mencakup keseluruhan cara peneliti dalam merumuskan masalah hingga pada temuan kesimpulan. Proses dalam menemukan kesimpulan dibutuhkan pendekatan yang tepat untuk bagaimana menjelaskan serta memahami penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Sehingga dalam penelitian ini penulis termasuk ke dalam jenis penelitian Kualitatif deskriptif penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang menggunakan metode pengamatan tanpa terlibat (PTT) serta menggunakan studi kasus tertentu dalam melakukan penelitian ilmiahnya. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya.<sup>20</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

United Nations for Women (UN Women) adalah organisasi masyarakat internasional dibawah badan Perserikatan bangsa-bangsa yang tumbuh dan berkembang pesat hingga saat ini. UN Women membantu mengurangi berbagai permasalahan yang seringkali dihadapi oleh banyak negara-negara di dunia, khususnya tentang ketidaksetaraan gender. Peran UN Women sebagai entitas PBB yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global

---

<sup>19</sup>Drs. P. Wahana, Mag.Hum, 'Filsafat Ilmu Pengetahuan,' Pustaka Diamond, Yogyakarta, 2016, p. 5.

<sup>20</sup>L. Putrawandi Karjaya, dkk. 'Kebijakan Pariwisata Lombok untuk Melepaskan Ketergantungan terhadap Pariwisata Bali menuju Pariwisata Internasional', *Jurnal Transformasi Global* Vol. 3 No. 2, pp.151-154.

atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, yang menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Berakhirnya masa Perang Dunia II memberikan harapan baru bagi masyarakat internasional untuk membentuk organisasi-organisasi internasional yang dapat membawa keamanan dan perdamaian dunia.<sup>21</sup>

### **Kerjasama dan Rekomendasi Kebijakan UN Women di Lebanon**

Berikut ini Adapun serangkaian rekomendasi untuk mencapai pemulihan ekonomi gender yang responsif di Lebanon adalah disusun dari analisis yang lebih besar dan akan datang tentang dampak gender dari krisis ekonomi Lebanon pada berbagai aspek kehidupan perempuan. Rekomendasi tersebut berfokus pada kebijakan fiskal, sosial dan tenaga kerja, dan ditujukan untuk membentuk para pembuat kebijakan Kerangka kerja Pemulihan Lebanon (Gender Responsive Recovery). Rekomendasi kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang dibangun di atas kesetaraan dan itu memanfaatkan potensi ekonomi semua orang Lebanon. Rekomendasi utama diberikan untuk:<sup>22</sup>

1. Berinvestasi dalam reformasi dan pembiayaan sistem perlindungan sosial di Lebanon, memprioritaskan penanganan diskriminasi gender yang bertahan dalam instrumen dan undang-undang perlindungan sosial Lebanon; mempromosikan

---

<sup>21</sup>S. Galuh Artika, Hamka, & A. Noerzaman, "Peranan United Nations Women dalam Mengatasi tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2016 -2017", vol.1, no.1, 2020, p.31.

<sup>22</sup>UN Women, 'Policy Brief: Gender Responsive Recovery in Lebanon', Beirut Lebanon, 2019, p. 2.

perpajakan progresif untuk mengembangkan Basis pajak Lebanon dan memperluas perlindungan sosial; berkomitmen untuk menahan diri dari penghematan pengeluaran di sektor-sektor kesehatan dan Pendidikan

2. Mendukung skema pensiun komprehensif yang menggabungkan sistem iuran yang lebih baik dengan komponen pensiun sosial yang dibiayai pajak non-iuran untuk memberikan perlindungan sosial yang kuat bagi orang tua. Dalam jangka pendek, untuk mengatasi kerugian bagi pensiunan saat ini dan yang akan datang sebagai akibat dari keruntuhan ekonomi, orang tua harus dimasukkan dalam program bantuan sosial yang sedang dirancang; Memperpanjang cuti hamil berbayar dan memperkenalkan cuti hamil berbayar; memperkenalkan skema asuransi bersalin yang didanai melalui Dana Jaminan Sosial Nasional, untuk mengurangi insentif bagi pengusaha untuk memprioritaskan mempekerjakan laki-laki; dan Reformasi sistem Kafala (perbudakan) untuk mempromosikan perlindungan yang lebih besar bagi pekerja rumah tangga dalam perekonomian di sektor domestik
3. Mendorong formalisasi ekonomi, dengan mendukung perluasan basis pajak Lebanon dan meningkatkan masuk dan retensi perempuan di pasar tenaga kerja, dengan fokus awal pada pemilik usaha mikro perempuan

dan memberikan dukungan untuk usaha mikro dapat bergantung pada non-diskriminasi dalam pekerjaan.

### **Peran UN Women untuk Mengurangi Diskriminasi di Lebanon**

Adapun beberapa kebijakan serta program yang dapat dibagi dalam tiga bidang pemberdayaan, yaitu pemberdayaan ekonomi, sosial, dan keamanan. Penulis akan menganalisis upaya dari UN Women menggunakan fungsi dari suatu organisasi internasional menurut *Clive Archer*, yaitu pertama fungsi OI sebagai inisiator, fasilitator, mediator, dan determinator.

#### **Women Economic Empowerment (WEE)**

Women Economic Empowerment (WEE) dimulai pada tahun 2015, memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan yang paling rentan sekalipun memiliki jaminan pendapatan, akses ke pekerjaan yang layak, dan otoritas ekonomi untuk mempengaruhi akses ke aset dan sumber daya. Program WEE telah menerapkan tiga komponen utama yang saling terkait dan berupaya membangun keterlibatan perempuan dalam perekonomian. Adapun ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut: a) penciptaan kesempatan kerja melalui pelatihan keterampilan, penempatan kerja, dan dukungan kewirausahaan; b) layanan untuk mencegah dan melindungi perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender; c) keterlibatan dengan sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang memungkinkan dan lingkungan operasi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Women Economic Empowerment (WEE) berkontribusi pada pencapaian SDG poin ke-5: mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan dan anak perempuan, dan SDG poin ke-8: mempromosikan berkelanjutan, inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.<sup>23</sup> Sehingga program World Economic Empowerment (WEE) termasuk ke dalam fungsi suatu organisasi internasional yang menginisiasi atau sebagai inisiator secara penuh dalam prinsip dan upaya untuk melibatkan perempuan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan mitra lainnya.

#### **Dana untuk Kesetaraan Gender (Fund for Gender Equality)**

Fund for Gender Equality (FGE) adalah inisiatif global yang memberikan hibah berdampak tinggi yang disalurkan langsung ke pekerjaan masyarakat sipil untuk mendorong pemberdayaan politik dan ekonomi perempuan di seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Modalitas IMF telah beroperasi dalam pengaturan yang kompleks, menangani berbagai tingkat kerentanan dan marginalisasi, berinvestasi dalam kemampuan inovasi mereka sebagai perantara untuk perubahan. Fund for Gender Equality (FGE), sejak 2009 lalu adalah satu-satunya mekanisme UN Women dalam memberikan hibah global untuk masyarakat sipil. Ini mendukung organisasi masyarakat sipil nasional yang dipimpin perempuan dalam memajukan perempuan pemberdayaan ekonomi dan politik, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dibuat dengan investasi awal sebesar USD 65 juta dari Pemerintah Spanyol dan memobilisasi tambahan USD 20 juta dari donor sektor pemerintah dan

---

<sup>23</sup>L. Kholid Alfirdaus, 'Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)', Vol. 13, No. 1, Tahun 2018. p. 25.

swasta lainnya sejak saat itu, tetap ada hari ini model pemberian hibah unik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip aksesibilitas, kepercayaan dan kepemilikan perempuan.<sup>24</sup>

Di Lebanon, FGE tersebut mendukung transisi perempuan yang rentan dari skala kecil, produksi rumahan, hingga mendukung kontrol yang lebih besar atas pendapatan. Ini target kerja perempuan pedesaan, selain migran dan pengungsi perempuan Suriah, Irak, dan Mesir dan orang Sudan. Hingga saat ini, dana tersebut telah menjangkau total 36.000 orang di Lebanon, menciptakan lebih dari 320 orang peluang pasar baru bagi wanita, 9 outlet pemasaran permanen, termasuk mendirikan dan mendukung 18 koperasi dan sosial yang dipimpin perempuan perusahaan, dalam kemitraan dengan 19 kota. Dana tersebut memfasilitasi pelatihan dan pendidikan kejuruan untuk lebih dari 2.200 wanita, pemerintah daerah dan anggota masyarakat, menangani norma-norma sosial dan menjangkau kelompok yang tertinggal. Berdasarkan hal tersebut UN Women tidak hanya menginisiasi suatu program atau kebijakan bahkan membentuk kerjasama yang sangat menguntungkan bagi keterlibatan perempuan.

### **Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS)**

Pada tanggal 19 Juni 2008, Dewan Keamanan PBB mengadakan dialog terbuka yang bertema "*Women, Peace and Security: Sexual Violence in Situations of Armed Conflict*". Dialog terbuka ini kemudian menghasilkan Resolusi 1820 yang menyadari bahwa penggunaan kekerasan seksual sebagai bagian dari perang dapat mengancam keamanan dan

kedamaian internasional. Resolusi 1820 menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat memperburuk konflik bersenjata, mengancam pemulihan keamanan dan kedamaian internasional, dan berpengaruh terhadap perdamaian berkelanjutan, rekonsiliasi dan pembangunan. Pekerjaan Wanita, Perdamaian dan Keamanan UN Women Lebanon terdiri dari lima bagian berikut, salah satunya mencakup fungsi OI sebagai mediator/rekonsiliator konflik. Seperti yang dijelaskan dibawah ini:<sup>25</sup>

**Mediasi:** Dukungan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam upaya mediasi lokal untuk mengurangi komunitas ketegangan dan desain dan pelaksanaan peringatan dini masyarakat dan mekanisme pencegahan konflik, dilakukan bekerja sama dengan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). Melalui kerja ini UN Women telah mendukung berdirinya kelompok mediator perempuan lokal yang memimpin upaya penyelesaian konflik berbasis masyarakat melalui dialog dan pemahaman sebagai alat untuk perdamaian. Pada saat yang sama UN Women bekerja dengan perempuan dari partai politik dan perempuan dari gerakan protes Oktober 2019 untuk mendukung dialog dan pembangunan kepercayaan. Untuk melengkapi karya ini, UN Women akan membentuk jaringan mediator perempuan nasional untuk bertukar pengalaman dan mengusulkan secara inklusif solusi perdamaian di tingkat nasional.

**Rekonsiliasi:** Dukungan terhadap upaya rekonsiliasi nasional, bekerja sama dengan UNDP dan OHCHR. Melalui PBB

---

<sup>24</sup>UN Women's Fund for Gender Equality, Annual Report (2019-2020), Arab States, p. 5.

---

<sup>25</sup> UN Women, in brief; Women, Peace, and Security, Beirut Lebanon, 2019, p.2

bersama program, UN Women bekerja untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan kejahatan gender dari perang sipil, dan untuk mendukung perempuan memimpin kelompok rekonsiliasi untuk mempromosikan ruang diskusi tentang masa lalu dan bertujuan untuk mempromosikan pendekatan holistik untuk berurusan dengan masa lalu dengan berfokus pada mengatasi konflik pada tingkat individu dan struktural untuk mengubah sikap, keyakinan, nilai-nilai individu dan masyarakat, dan membangun kembali hubungan untuk perdamaian yang berkelanjutan.

#### **Dampak Kebijakan terhadap Diskriminasi Perempuan di Lebanon**

Memimpin dukungan kepada pemerintah dalam pengembangan dan pengesahan Rencana Aksi Nasional Lebanon tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan tahun 2019 lalu serta dukungan kepada Komisi Nasional Perempuan Lebanon (NCLW) untuk menetapkan mekanisme implementasi dan pelaporan dukungan berkelanjutan untuk kelompok mediasi perempuan di Lebanon selatan (dalam kemitraan dengan UNIFIL) dan UNRWA mengelola kamp pengungsi Palestina di Lebanon, yang bekerja untuk memperluas saluran dialog di komunitas mereka dan mengidentifikasi prioritas bersama untuk pencegahan konflik Bantuan hukum kepada para penyintas orang hilang. Pemerintah Lebanon: Komisi Nasional Wanita Lebanon (NCLW), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Sosial, Parlemen, Komite Nasional untuk Orang Hilang dan kotamadya. Organisasi masyarakat sipil: akademisi, media, jaringan mediasi regional dan internasional, tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok berbasis universitas, kelompok hak-hak

perempuan dan bantuan hukum dan organisasi layanan dukungan.

#### **KESIMPULAN**

Masuknya UN Women ke Lebanon menjadi salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat internasional dalam mengurangi diskriminasi perempuan di Lebanon. Usaha tersebut mengalami perkembangan dengan mulai dibentuknya pemerintahan baru, menjadi awal untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Melalui salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perempuan yaitu UN Women, seolah memberikan jalan serta harapan baru di masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang terus dikembangkan dan digali sehingga perlahan Lebanon terus membuka diri dan mulai berbenah ke arah yang lebih baik. UN Women bekerja di seluruh bidang kemanusiaan, pembangunan, perdamaian, dan keamanan untuk mendukung upaya nasional untuk mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Lebanon. Bekerja dengan aktor nasional, mitra pembangunan, masyarakat sipil, dan akademisi dalam membangun kebijakan yang memungkinkan lingkungan sosial melakukan pemberdayaan untuk perempuan, serta dalam mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan gender. Termasuk intervensi penyampaian layanan yang responsif gender untuk komunitas Lebanon dan pengungsi. Melalui beberapa kebijakan serta program yang telah dilakukan di Lebanon, UN Women mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih responsif terhadap gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pareira, 'Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional', Bandung Citra Aditya Bakti; 1999, p. 135.
- C. Archer, 'International Organizations: Third Edition,' New York: Routledge, 2001, p. 7.
- Drs. P. Wahana, Mag.Hum, 'Filsafat Ilmu Pengetahuan,' Pustaka Diamond, Yogyakarta, 2016, p. 5.
- KBRI, 'Tentang Lebanon', <<https://kemlu.go.id/beirut/id/read/tentang-lebanon/219/information-sheet>>, diakses pada 07 Januari 2023.
- L. C. Siswanto, and A. A. Basith Dir, 'Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death,' Journal of International Relations, vol. 6, no. 4, 2020, pp. 517-524.
- L. Kholid Alfidrus, 'Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)', Vol. 13, No. 1, Tahun 2018. p. 25.
- L. Putrawandi Karjaya, dkk. 'Kebijakan Pariwisata Lombok untuk Melepaskan Ketergantungan terhadap Pariwisata Bali menuju Pariwisata Internasional', Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 2, pp.151-154.
- M. Ari Yulianto, 'Lebanon: Pra dan Pasca Perang 34 Hari Israel vs Hizbullah,' Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat, 2013, p. 60.
- M. Barnett & M. Finnemore, 'Rules for the World: International Organizations in Global Politics,' Cornell University Press, United States of America, 2004, pp. 5-6.
- M. Dymas Oryza, 'Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan,' Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5, No. 2, (2016).
- M. Purwanti, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 'Kewajiban dan Tanggung jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia,' Legal Smart Channel, <<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>> diakses pada 25 November 2021
- N. Maya Mahardika, 'Peran dan Fungsi UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Uganda' (2014 -2021), 2021. p.4. <sup>1</sup>
- S. Ayuningtiyas, 'Peran UN Women dalam Melindungi Hak-hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya terhadap Kesetaraan Gender,' Universitas Pasundan, 2016, p. 44.
- S. Galuh Artika, Hamka, & A. Noerzaman, "Peranan United Nations Women dalam Mengatasi tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2016 -2017", vol.1, no.1, 2020, p.31.
- UN Women impact stories: Women, peace, and security,' *UN Women*, 2021, <<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/brief-un-women-impact-stories-women-peace-and-security>>, diakses pada 26 Oktober 2021.
- UN Women, 'Arab States' <<https://arabstates.unwomen.org/en/countries/lebanon>> diakses pada 27 Juli 2021.
- UN Women, 'Areas of work and programmes-Lebanon', <<https://arabstates.unwomen.org/en/countries/lebanon/areas-of-work-and-programmes>>, diakses pada 02 Februari 2022.
- UN Women, 'Gender-Responsive Recovery in Lebanon: Recommendations for Fiscal,

- Social and Labour Policy Reform’,  
<<https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/gender-responsive-recovery-in-lebanon>>,  
diakses pada 02 Februari 2022.
- UN Women, ‘In Brief: Women, Peace, and Security’,  
<<https://arabstates.unwomen.org/en/countries/lebanon/areas-of-work-and-programmes>>, diakses pada  
02 Februari 2022.
- UN Women, ‘Policy Brief: Gender Responsive Recovery in Lebanon’,  
Beirut Lebanon, 2019, p. 2.
- UN Women, ‘Women’s Needs and Gender Equality in Lebanon’s COVID-19 Response’,  
<<https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/gender-equality-in-lebanon-covid-19-response>>, diakses pada 02  
Februari 2022.
- UN Women, in brief; Women, Peace, and Security, Beirut Lebanon, 2019, p.2
- UN Women’s Fund for Gender Equality, Annual Report (2019-2020), Arab States, p. 5.
- World Bank, ‘Lebanon Economic Monitor: The Deliberate Depression’, World Bank Group, Washington DC, 2020, p. 20.